

IMPLEMENTASI DESENTRALISASI PENDIDIKAN TERHADAP OTONOMI DAERAH

Oleh : Sugiyanto

STPMD "APMD" Yogyakarta

Diterima 19 September 2001 / disetujui 11 Oktober 2001

Abstracts

The essence of education decentralization is transfer the entire or a part authority management education service from central government to local government unit. Education decentralization must be answer local development situation and condition, necessity and values in the regional.

The education is which determines economic growth/ as a part of development process, The education an investation of human resourses development will increase ability and skill agree with community necessity aspiration and development.

Local financial sector is very influence to education decentralization existense, because local government must be assume liability for cost education.

Key words : education investment, strategic planning, decentralization mission

Pendahuluan

Berlakunya UU No. 22 tahun 1999 telah mereduksi peranan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang selama tiga dasawarsa mengalami proses sentralisasi. UU ini merupakan landasan hukum proses desentralisasi kekuasaan dengan memberikan kekuasaan otonomi penuh kepada daerah. Pemberlakuan UU ini bukan saja secara fundamental berdampak pada kehidupan politik pemerintahan saja, tetapi juga pada bidang kehidupan lainnya termasuk pendidikan. Untuk itu, arah kebijaksanaan pembangunan pendidikan pada masa yang akan datang harus sejalan dengan kebijaksanaan desentralisasi bidang pendidikan itu sendiri. Desentralisasi pendidikan meletakkan lembaga pendidikan sebagai garis terdepan dalam pengelolaan pendidikan. Desentralisasi juga memberikan apresiasi terhadap perbedaan kemampuan dan beraneka-macam kondisi daerah dan rakyatnya.

Desentralisasi pendidikan sebagai implementasi Otonomi Daerah dihadapkan dengan tantangan untuk menjamin pemerataan mutu dan relevansi pendidikan di tengah pergumulan perbedaan potensi, kemampuan keuangan, dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap esensi pelayanan pendidikan. Menurut Aljumami (dalam Huda, 1999: 9-11), kebijaksanaan desentralisasi berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan dan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada empat dampak positif yang dapat dikemukakan untuk mendukung argumen atas kebijakan desentralisasi pendidikan yaitu (1) peningkatan mutu, (2) efisiensi keuangan, (3) efisiensi administrasi, dan (4) perluasan dan pemerataan misi. Desentralisasi pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara unik, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menopang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman serta terserapnya globalisasi, humanisasi dan demokrasi dalam pendidikan (Huda, 1999: 9-11).

Sektor pendidikan pada otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan menempatkan pemerintah daerah dan masyarakat pada posisi siap untuk menerima tanggung jawab baru tersebut. Persoalan utamanya adalah bagaimana agar semua pihak sadar terhadap tanggung jawab baru tersebut. Persoalan berikutnya adalah bagaimana agar semua pihak bekerja sama meningkatkan kemampuan daerah agar optimal dalam mewujudkan otonomi termasuk bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga dapat dilakukan langkah operasional yang lebih realistis untuk menghindari agar desentralisasi pendidikan tidak justru membuat kesalahan bahkan kemunduran dalam bidang pendidikan. Untuk itu, agar daerah diberi rambu-rambu dalam pemanfaatan alokasi umum pada APBD sehingga minimal 15% dari APBD dialokasikan untuk pendidikan.

Perbedaan sasaran pembangunan dan potensi sumber daya berakibat adanya keragaman pengeluaran pembangunan antar propinsi dan daerah/kota di Indonesia. Pengeluaran pembangunan di sektor pendidikan di tingkat propinsi tahun 1998/1999-1999/2000 memperlihatkan variasi baik jumlah dan peningkatannya (lihat tabel 1)

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah APBD tahun anggaran 1998/1999 secara nasional berjumlah Rp. 20.853.872; dan jumlah belanja pendidikan Rp. 795.280.775.000; jadi 3,8% anggaran APBD dialokasikan ke belanja pendidikan.

Pada tahun anggaran 1999/2000 jumlah APBD secara nasional Rp. 19.624.106.113; dan jumlah belanja pendidikan Rp. 1.060.981.187. Alokasi untuk dana pendidikan 5,0%. Jadi

anggaran APBD dari tahun 1988/1999 ke tahun 1999/2000 naik 1,2 %.

Belanja pendidikan tahun anggaran 1998/1999 tertinggi terdapat pada propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 3.159.240.333; dan terendah propinsi Bengkulu Rp. 224.711.675; sedang *mean* APBD tahun 1998/1999 Rp 843.154.887. APBD tahun 1999/2000 tertinggi propinsi Jawa Barat Rp. 3.008.869.672; dan terendah Propinsi Bengkulu Rp. 216.142.669; sedang *mean*nya Rp. 784.964.244; Jumlah kabupaten/kota dari tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 1999/2000 mengalami penambahan sebanyak 7 kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan keseriusan daerah dalam menangkap peluang otonomi daerah.

Belanja pendidikan pemerintah propinsi dialokasikan dari APBD dalam bentuk belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja pendidikan pemerintah merupakan salah satu pengeluaran sektor pemerintah yang perlu diperhitungkan dalam mengukur Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB). Peningkatan alokasi belanja pendidikan secara simultan akan menambah PDRB daerah yang bersangkutan seperti terlihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2 : APBD dan Pengeluaran Sektor Pendidikan
Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun Anggaran 1998/1999 – 1999/2000
Tidak termasuk DKI
(000 Rupiah)**

No	Propinsi	Rata-rata APBD/ Kota/Kabupaten		Rata-rata Belanja Pendidikan Kota/Kab	
		1998/1999	1999/2000	1998/1999	1999/2000
1	Aceh	49.476.123	79.535.230	6,0	7,0
2	Sumut	73.416.964	13.639.990	4,0	4,0
3	Sumbar	37.416.964	60.116.041	5,0	5,0
4	Riau	98.214.172	97.120.294	7,0	4,0
5	Jambi	61.609.400	68.424.387	7,0	5,0
6	Sumsel	81.601.809	105.942.378	4,0	6,0
7	Benkulu	56.177.918	71.261.195	5,0	5,0
8	Lampung	91.743.045	86.323.428	3,0	6,0
9	Jawa Barat	1.147.920.943	164.001.411	4,0	5,0
10	Jawa Tengah	69.133.564	100.014.393	5,0	3,0
11	DIY	73.009.800	95.477.451	4,0	4,0
12	Jawa Timur	73.944.126	133.233.870	4,0	3,0
13	Bali	73.851.391	127.871.192	3,0	4,0
14	NTB	52.994.891	91.077.772	3,0	7,0
15	NTT	37.276.269	53.490.048	11,0	6,0
16	Kalbar	71.228.280	95.227.467	6,0	6,0
17	Kalteng	71.422.697	90.487.475	6,0	6,0
18	Kalsel	52.513.920	63.502.761	6,0	6,0
19	Kaltim	106.887.718	175.897.328	3,0	5,0
20	Sulut	57.947.809	69.927.764	4,0	5,0
21	Sulteng	57.007.895	89.154.765	3,0	10,0
22	Sulsel	38.414.938	60.245.328	4,0	4,0
23	Sultenggara	3.271.304	3.351.559	7,0	7,0
24	Maluku	4.539.791	6.044.051	6,0	10,0
25	Irian Jaya	3.479.502	4.789.782	6,0	6,0

Sumber: Katalog BPS 745 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten 1998/1999-1999/2000 Mei 2001.

Sesuai dengan tabel 2 pada tahun anggaran 1998/1999 APBD rata-rata per kabupaten/kota tertinggi terdapat pada propinsi Jawa Barat yakni sebesar Rp. 121.509.243 dan terendah propinsi Sulawesi Utara Rp. 18.746.284; Pada tahun anggaran 1999/2000 APBD rata-rata per kabupaten/kota tertinggi di Jawa Barat Rp. 115.725.756; dan terendah Propinsi Sulawesi Utara Rp. 18.550.117. Jadi, dua

tahun anggaran propinsi yang menduduki APBD tertinggi dan terendah tidak mengalami pergeseran.

Di antara 25 propinsi, propinsi yang mengalami peningkatan belanja pendidikan dari tahun anggaran 1989/1999 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 ada 11 propinsi yaitu Daerah Istimewa Aceh 1%, Lampung 3%, Jawa Barat 15%, Riau 1%, NTB 4%, Kalimantan Timur 2%, Sulawesi

Utara 1%, Sulawesi Tenggara 7%, Maluku 4% dan Irian Jaya 3 %. Propinsi yang mengalami penurunan anggaran belanja pendidikan ada 5 propinsi yaitu Propinsi Nusa Tenggara Timur 5%, Jawa Timur 1 %, Jawa Tengah 2 %, Jambi 2% dan Riau 3%, sedangkan propinsi yang stabil anggaran belajanya ada 9 yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Kenaikan secara riil dari 11 propinsi 29% dan penurunan secara riil dari 5 propinsi ada 13%. Jadi, kenaikan anggaran belanja pendidikan secara parsial ada 13 % dari perhitungan menurut jumlah propinsi ada 29% propinsi yang naik anggaran belajanya, yang turun 20% dan stabil 36%. Ternyata di antara 25 propinsi belum ada propinsi yang menganggarkan pada belanja ideal pendidikan pada standar 15%. Jadi, dengan berlakunya UU No 21 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. 29 % propinsi sudah mengarah pada pemikiran peningkatan SDM dengan jalan meningkatkan anggaran belanja pada aspek pendidikan. Dikaitkan dengan investasi SDM, belanja pendidikan pemerintah merupakan perwujudan pemerintah dalam menyiapkan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Sebagai bagian dalam program pembangunan nasional, pendidikan diharapkan akan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Pemerataan memperoleh layanan mutu dan relevansi pendidikan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Investasi pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam membiayai kegiatan dan pembangunan berbagai program layanan pendidikan. Investasi pemerintah di bidang

SDM dimaksudkan untuk meningkatkan mutu SDM yang memiliki keahlian dan keterampilan, dapat bekerja secara profesional serta menghasilkan karya yang bermutu dalam proses pembangunan bangsa (Suryadi, 1997: 63-65). Menurut Schultz (1963: 42) dan Cohn (1975: 37-39), pendidikan adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep ini pendidikan dipandang sebagai kegiatan kelembagaan (sekolah). Keberadaan siswa yang menuntut ilmu merupakan konsumen yang akan membayar jasa pelayanan sekolah dalam bentuk uang gedung, SPP, praktikum dan sebagainya. Ini berarti bahwa konsumsi jasa pendidikan dan belanja pemerintah daerah akan berpengaruh secara multiplier terhadap peningkatan PDRB. Terkait dengan peningkatan kualitas input pembangunan bangsa, Chon (1975) menyatakan bahwa lembaga pendidikan berfungsi dalam mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan produksi dan perubahan teknologi. Pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kapasitas produktivitas tenaga kerja sebagaimana kontribusi kapital fisik dalam meningkatkan kapasitas produksi perusahaan (O'Neill dalam Satori, 1999: 1-27).

Desentralisasi Pendidikan

Arus globalisasi memberikan tantangan bagi lembaga pendidikan untuk mampu mengembangkan diri secara mandiri, cepat dan benar. Lembaga pendidikan dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas atau unggul sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan harus mampu pula berperan dalam upaya penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah. Mengingat kemampuan sumber daya pemerintah untuk memikul beban pendidikan, upaya pengembangan harus

lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan menyempurnakan sistem manajemen yang lebih efisien dan efektif. Lebih-lebih dalam menghadapi situasi globalisasi seperti sekarang ini, sangat diperlukan sistem manajemen lembaga pendidikan yang proaktif, interaktif dan fleksibel.

Implementasi sistem pendidikan nasional di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari paradigma tata pemerintahan yang dikembangkan. Menurut Thoha (1999: 1-7), dengan adanya perubahan paradigma dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan, visi pendidikan pada masa depan harus berorientasi pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan otonomi daerah desentralisasi pendidikan harus dapat menjawab situasi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang berkembang di daerah. Hal itu sejalan dengan pendapat Satori (1999: 1-22) bahwa para perencana dan pengelola pendidikan dipersyaratkan memiliki kemampuan untuk mengkaji masalah-masalah pendidikan strategik dalam konteks pembangunan kewilayahan.

Esensi desentralisasi pendidikan adalah penyerahan seluruh atau sebagian wewenang pengelolaan layanan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah/kota (Huda, 1999: 5 - 25, Thoha, 1999: 1 - 7). Menurut Mahdiansah (1999: 30-59) desentralisasi pengambilan keputusan dalam mengatasi persoalan pendidikan di daerah harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Perspektif pembangunan pendidikan dipengaruhi kebutuhan SDM dan komitmen pemerintah serta potensi keuangan daerah/kota yang dialokasikan untuk fasilitas dan layanan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Makmun (1999: 1-24) analisis kebutuhan pendidikan mencakup perkiraan populasi angkatan kerja, kualifikasi dan entitas SDM, serta sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang diperlukan.

Tujuan dikeluarkannya kebijakan nasional tentang desentralisasi adalah dapat dipersatukannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, rambu-rambu dibuat oleh pusat berkait dengan kebutuhan daerah. Daerah diberi kewenangan untuk mengaktualisasikan daerahnya masing-masing, tetapi kebijakan yang diambil oleh setiap daerah tidak boleh bertentangan dengan rambu-rambu dari pusat. Kebijakan-kebijakan yang diberikan daerah seharusnya meliputi penentuan kurikulum, kebutuhan akan guru, model penerimaan siswa baru, penentuan nama sekolah dan sistem belajar mengajar. Dengan demikian, dalam mengembangkan lembaga pendidikan pemberdayaan diperlukan kesadaran kolektif masyarakat atas *performance* pengelola lembaga pendidikan sehingga pengelola sekolah perlu melibatkan seluruh *stake holder* yang ada di daerah.

Perwujudan pemberdayaan daerah dalam kaitannya dengan implementasi desentralisasi pendidikan antara lain sebagai berikut.

1. Setiap lembaga pendidikan diberi kewenangan penuh untuk menentukan taksonomi keilmuan sehingga lembaga pendidikan akan memiliki kepercayaan diri baik secara legalitas maupun secara keilmuan.
2. Kurikulum selama ini baik SD, SLTP, SMK, SMU dan Perguruan Tinggi terasa terlalu bias pada kepentingan negara sehingga membatasi ruang dan gerak lembaga pendidikan. Sehingga hal ini harus diperbaiki.
3. Substansi kurikulum yang digunakan kurang sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat sehingga dipandang kurang efektif untuk pemberdayaan mahasiswa/siswa.
4. Masih terdapat beberapa tenaga pengajar yang kurang kompeten dengan bidang keilmuan yang diajarkan, khususnya di

SMK, SMU atau bahkan perguruan tinggi baik negeri atau swasta.

5. Di Indonesia pada umumnya, dan khususnya di SMK, SMU dan perguruan tinggi belum memiliki sistem proses belajar mengajar yang mantap, sebagai contoh setiap ganti menteri akan diikuti dengan pergantian kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan sehingga berbagai pihak yang terlibat di dalam proses belajar masih tradisional.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu kiranya regulasi pemerintah yang terlalu membatasi otonomi lembaga pendidikan di daerah diturunkan porsinya dan diarahkan untuk mendukung kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Terkait dengan alokasi anggaran pembangunan, propinsi mempunyai tugas dan wewenang untuk memperjuangkan proporsi anggaran pendidikan yang dapat *diamankan* dalam persaingan dengan sektor lainnya serta menetapkan alokasi per jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan skala prioritas nasional. Dalam otonomi, anggaran pendidikan yang dialokasikan dari APBD hendaknya lebih operasional dan konsisten dengan laju pertumbuhan penduduk serta kebutuhan pendidikan masyarakat. Rancangan program pembangunan daerah akan menentukan spesifikasi tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang dikembangkan.

Dalam pemikiran yang lebih pragmatis, pendidikan merupakan salah satu penentu pertumbuhan ekonomi (Satori, 1999: 1-22). Sebagai bagian dari proses pembangunan, pendidikan dinyatakan sebagai investasi pengembangan SDM akan meningkatkan kemampuan dan kecakapan sesuai aspirasi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Perhitungan PDRB kabupaten/kota dengan menggunakan metode produksi pada

sektor jasa belum memperhitungkan sumbangan pendidikan. Nilai layanan pendidikan di daerah merupakan jumlah yang relatif cukup besar dalam perhitungan PDRB. Proyeksi konsumsi layanan pendidikan dihitung berdasarkan *unit cost* dari tingkat partisipasi pendidikan masyarakat.

Tingkat Partisipasi Pendidikan (TPP) merupakan rasio antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. TPP dibedakan dalam *gross enrollment ratio* dan *nett enrollment ratio*. *Gross enrollment ratio* merupakan rasio total siswa SD, SLTP, dan SMU/SMK dan total penduduk usia 6-12, 13-15, 16-18 tahun di daerah tertentu. *Nett enrollment ratio* merupakan ratio total siswa SD atau SLTP atau SMU/SMK dan penduduk usia SD atau SLTP, SMU/SMK (BPS, 1995; O'Neill, 1995). Jumlah layanan pendidikan formal yang harus diselenggarakan suatu daerah dapat dihitung dari TPP. Semakin besar TPP maka layanan yang dikembangkan kabupaten/kota semakin mendekati kebutuhan pendidikan masyarakat dan pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan. Dengan metode pengeluaran yang memperhitungkan belanja pendidikan keluarga, masyarakat dan pemerintah dapat diketahui besar kecilnya kontribusi layanan pendidikan terhadap PDRB. Ini berarti bahwa semakin meningkat TPP akan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dari kenaikan PDRB dari waktu ke waktu.

Rencana Strategis Manajemen Lembaga Pendidikan

Sekarang sudah waktunya untuk dipikirkan bagaimana mengembangkan institusi berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan pemanfaatan peluang yang ada, dengan diikuti oleh upaya meminimalkan kelemahan dan menanggulangi ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Dalam

menghadapi tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat dan seringkali tidak diperkirakan sebelumnya, para pimpinan perlu memberikan tanggapan, minimal dalam tiga hal (Bryson, 1999: 66) sebagai berikut.

- 1) Organisasi harus berpikir secara strategis.
- 2) Harus diterjemahkan pemikiran menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan.
- 3) Harus dapat dikembangkan pemikiran yang diperlukan dalam rangka mendasari perumusan dan penetapan strategis

Dalam kaitannya dengan manajemen pendidikan, perencanaan strategis pada lembaga pendidikan seharusnya memfokuskan kepada organisasi dan apa yang harus dilakukan oleh organisasi semata-mata untuk memperbaiki kinerja guna mendukung stabilitas akademik atmosfer, sehingga arah paradigma perencanaan strategis kiranya gayut dengan pendapat Olsen dan Edie (1982: 42) yang memberikan definisi perencanaan strategis sebagai *a disciplined effort to produce fundamental decision and action that shape and guide what an organization (or other entity) is what it does and why it does it*. Untuk penyusunan rencana strategis yang baik, sangat diperlukan pengumpulan informasi yang seluas-luasnya, eksplorasi berbagai alternatif, dan penekanan pada implikasi untuk masa mendatang dari keputusan-keputusan yang diambil sekarang. Penyusunan rencana strategis yang baik akan dapat meningkatkan terlaksananya komunikasi dan partisipasi yang diperlukan, terakomodasikannya minat dan nilai-nilai divergen, tersusunnya keputusan-keputusan secara sistematis dan terlaksananya implementasinya rencana strategis dengan baik.

Keterkaitan organisasi dengan sistem perencanaan strategis disebabkan oleh berbagai alasan, terutama dari hasil positif yang diharapkan dapat diperoleh. Bryson

(1988: 76) menyebutkan beberapa segi positif sebagai berikut.

1. Cara berpikir strategis dan pengembangan strategis yang efektif.
2. Memperjelas arah pengembangan masa depan.
3. Penerapan urutan prioritas.
4. Mengambil keputusan pada waktu sekarang dengan pertimbangan kemungkinan konsekuensinya dimasa depan.
5. Mengembangkan landasan yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan untuk proses pengambilan keputusan.
6. Terdapat pemisahan secara maksimal komponen-komponen yang berada di bawah pengendalian organisasi.
7. Pengambilan keputusan lintas tingkatan dan fungsi.
8. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan pokok organisasi
9. Meningkatkan unjuk kerja organisasi
10. Penanganan secara efektif terhadap akibat perubahan lingkungan
11. Menghasilkan team work dan keahlian.

Selanjutnya ada pula beberapa kondisi yang kurang sesuai untuk diterapkan perencanaan strategis pada organisasi, yakni bila (1) organisasi mengalami kemunduran yang berarti, dan (2) organisasi mengalami kesukaran karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia, sumber daya pada umumnya komitmen dari para pengambil keputusan untuk menyusun perencanaan yang baik (Barry, 1986: 288). Ada juga beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan seperti kemungkinan bahwa proses penyusunan rencana strategis serta implementasinya memerlukan biaya yang melebihi biaya yang dapat diperoleh atau proses menyerap tenaga, waktu, dan dana yang kiranya lebih tepat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

Manajemen strategis pada dasarnya berkaitan erat dengan proses perumusan arah pengembangan organisasi ke masa depan

untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang dan sasaran jangka pendek. Rencana strategis dalam konteks manajemen merupakan siasat yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Dari jangka panjang diturunkan menjadi beberapa kebijakan pendidikan, yang dalam penjabarannya kebijakan harus berakar pada visi dan misi (kebijakan pusat). Kaitannya renstra dan manajemen strategi, pelaksanaan desentralisasi pendidikan harus berdasarkan visi dan misi nasional sehingga strategi daerah tidak bertentangan dengan pusat. Pelaksanaan pendidikan di seluruh daerah harus memfungsikan semua stake holder sebagai sumber daya manusia daerah. Manajemen strategi mencakup tujuh langkah kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya (Boseman dan Pathak, 1989: 28), yakni:

1. penilaian organisasi dalam kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*),
2. perumusan misi organisasi,
3. perumusan falsafah dan kebijakan organisasi,
4. penetapan sasaran-sasaran strategis,
5. penetapan strategi organisasi,
6. implementasi strategi organisasi, dan
7. pengendalian strategi organisasi.

Langkah pertama sampai dengan kelima menunjukkan langkah-langkah perencanaan strategis, dan langkah ke enam sampai ke tujuh merupakan kegiatan implementasi dan pengendalian rencana strategis.

Implikasi terhadap Otonomi Daerah

Era otonomi daerah ini mengakibatkan pula berlangsungnya sifat *competitive* antar daerah yang makin meningkat tajam. Setiap daerah berpeluang untuk selalu berkompetisi dengan daerah lain. Peluang akan semakin banyak diperoleh apabila daya saing semakin kuat.

Kekuatan daya saing sangat dipengaruhi oleh kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sistem kelembagaan yang dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Dengan desentralisasi pendidikan pengelola lembaga pendidikan bersama daerah perlu memahami pangsa pasar terhadap peluang kerja. Berdasarkan hasil pemahaman tersebut, daerah harus mengambil sikap untuk menyelaraskan komponen keberhasilan sebuah lembaga pendidikan di antaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana SDM yang tersedia, ada atau tidak? Jika tidak, perlu kiranya mendatangkan dari daerah lain.
2. Disain kurikulum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja atau tidak? Jika tidak, daerah segera melakukan perombakan.
3. Standar kelulusan yang digunakan lazim atau tidak? Jika tidak, kita harus segera mengubah. Sebagai contoh standar kelulusan SMK menggunakan NPR dan NPR ditentukan oleh daerah. Dampak dari otonomi ini setiap siswa yang memiliki nilai ranking paling bawah/terakhir di SMK yang mengikuti Ebtan-EBTanas akan lulus sebab biasanya daerah mengambil nilai yang terbawah dari nilai siswa. Kondisi ini akan menjatuhkan lembaga pendidikan di daerah. Oleh sebab itu, berkait dengan desentralisasi dan peluang kerja, perlu dibangun sinergi antar daerah guna bersama-sama menghadapi tantangan dan pemenuhan kebutuhan daerah. Artinya daerah perlu bekerja sama untuk membuat suatu standar yang minimal sehingga kualitas tamatan baik satu daerah dengan yang lain tidak begitu jauh berbeda.

Untuk mendukung dan mendorong keberhasilan implementasi desentralisasi pendidikan, salah satu jalan yang dapat dilakukan oleh daerah adalah memperbesar peluang kerja yang dapat dilakukan dengan:

1. menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini pada peserta didik sampai tingkat perguruan tinggi,
2. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang lebih banyak mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dunia usaha, dan
3. menyiapkan usaha kecil dan menengah dengan muatan teknologi agar berubah menjadi usaha kecil modern dan mampu berkompetensi di dunia perdagangan pada umumnya.

Tantangan yang dihadapi benar-benar menuntut kesiapan dan kemampuan para perencana dan pelaku pembangunan. Keberhasilan otonomi daerah ini sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, alternatif terpenting adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu.

Djojonegoro (1996: 4) menyatakan bahwa sumber daya manusia berkualitas yang diharapkan dapat dihasilkan oleh dunia pendidikan di Indonesia paling tidak memenuhi empat kompetensi, yakni (1) kompetensi akademik, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi nilai dan sikap, dan (4) kompetensi untuk menghadapi perubahan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan merupakan sarana kehidupan modern yang pemanfaatannya mempersyaratkan kemampuan intelektual manusia di samping keterampilan fisik maupun mental serta keseimbangan antara kebijakan dan daya penalaran. Dengan mempertimbangkan keempat kompetensi tersebut, strategi pendidikan perlu diarahkan pada upaya peningkatan mutu di segala bidang dan peningkatan relevansinya dengan kebutuhan pembangunan nasional, baik menyangkut kebutuhan dunia kerja dan industri akan tenaga kerja, pengembangan industri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun

menyangkut tantangan pembangunan secara keseluruhan di masa depan.

Mengingat kemampuan sumber daya pemerintah daerah untuk memikul beban pembiayaan pengembangan pendidikan semakin terbatas, upaya pengembangannya harus lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka mendukung kesiapan otonomi daerah, dunia pendidikan diupayakan untuk lebih dapat menumbuhkembangkan usaha menengah dan kecil yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mampu berkompetensi.

Kesimpulan

Desentralisasi pendidikan sebagai implementasi otonomi daerah, dihadapkan dengan tantangan untuk menjamin pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan di tengah pergumulannya perbedaan potensi, kemampuan keuangan dan perhatian pemerintah daerah terhadap esensi pelayanan pendidikan. Persoalan otonomi bidang pendidikan meliputi isu kepentingan nasional yang berhadapan dengan kepentingan daerah, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan keuangan, pemerataan peranserta masyarakat dan akuntabilitas pendidikan.

Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara unik, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menopang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman yang mengarah pada bertindak lokal berfikir global, dan tercipta suasana humanisasi dan demokratisasi dalam pendidikan.

Kesenjangan mutu pendidikan dan pengembangannya cenderung semakin lebar. Pada satu sisi masih perlu upaya keras untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, relevansi, efisiensi dan mutu pendidikan, pada sisi

yang lain daya dukung, terutama yang berupa dana, cenderung semakin terbatas atau menurun. Untuk itu, diperlukan suatu alternatif yaitu perencanaan yang strategis di bidang pendidikan ini yang fleksibel dan lebih mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang akan terjadi, serta mampu menjawab isu-isu strategis yang dihadapi.

Salah satu alternatif yang perlu diperhatikan daerah dalam pengembangan pemberdayaan siswa/mahasiswa di lembaga pendidikan adalah dengan mengikuti rumusan Komisi Internasional tentang Pendidikan Abad ke-21 (*The International Commission on Education for the Twenty-first Century*) yang menyatakan bahwa pendidikan dalam arti luas harus bertumpu pada empat sendi atau soko guru, yaitu *learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be*.

Daftar Pustaka

- Barry, B.W. (1986). *Strategic Planning Workbook for Non Profit Organization*. St. Paul: Amherst H. Wilder Foundation
- Boseman, G, and Phatak, A.(1989). *Strategic Management and Text and Cases. Second Ed.* New York: John Wley.
- Bryson, J.N. (1988). *Strategic Planning For Public and Non Profit Organization*. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
- Cohn, E. (1974). *The Economic of Education*. USA: Balinger Publishing Company.
- Djojonegoro, W. (1996). *Peranan Pendidikan dalam Proses Industrialisasi Menghadapi Era Penduniaan Aspek. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Makalah disampaikan pada Seminar "Kemitraan Industri", Yogyakarta 11 November.
- Ghozali, A. (2000) "Pendidikan Antara Investasi Manusia dan Alat Diskriminasi", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, ke-6, No: 23, 65-77.
- Huda, N. (1999). "Desentralisasi Pendidikan Pelaksanaan dan Permasalahannya", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, ke-5, No 17, 5-25.
- Ismanto, B (2000). *Pengaruh Variabel Pendidikan dan Angkatan Kerja Dalam Model Pertumbuhan Ekonomi Antar Kota di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis S2 PPS UGM Yogyakarta..
- Satori, Dj. (1999) "Analisis Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan", *Seri Perencanaan Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal, Depdiknas, Jakarta, C-02; 1-27*.
- Thoha, M. (1999). "Desentralisasi Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, ke-5, No: 01:1-7.
- Tilaar, H. A. R. (1995). *Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, Satu Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.